

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan juga sejahtera. Kesejahteraan manusia terletak pada jiwa (nafs), perlindungan keimanan (din), akal (aqal), kekayaan (maal), dan juga keturunan (nasb). Didalam agama Islam mengajarkan seluruh umat muslim untuk tidak meninggalkan keturunan-keturunan mereka dalam keadaan yang lemah baik secara agama, ekonomi, ilmu maupun pertahanan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang mendasar di setiap negara. Tingkat kemiskinan disuatu negara juga merupakan suatu gambaran berhasil atau tidaknya pencapaian kerja pemerintah. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak daerah miskin yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah. Kemiskinan adalah kondisi suatu kehidupan yang serba kekurangan yang jalani oleh rumah tangga atau seseorang sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ataupun kebutuhan yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimum yang dimaksud yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, papan dan juga kebutuhan sosial yang diperlukan oleh rumah tangga atau perseorangan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.<sup>1</sup>

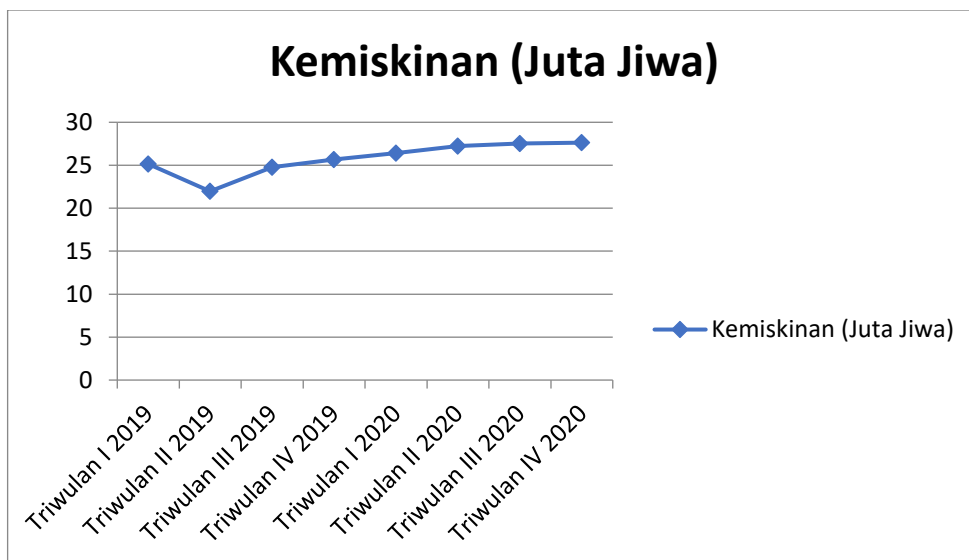
---

<sup>1</sup> Ginting, Ari M. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol.4 No,2 2013

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan utama pembangunan yang fundamental dan juga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan. Berbagai dimensi yang terkait dengan kemiskinan yaitu (1) dimensi ekonomi meliputi sandang, pangan, papan (rumah) dan juga kesehatan. (2) dimensi sosial dan budaya meliputi apatis, fatalistik, dan juga ketidakberdayaan. (3) dimensi struktural atau politik meliputi tidak mempunyai sarana politik, tidak mempunyai kekuatan politik dan juga berada pada status paling bawah. Berikut adalah grafik tingkat kemiskinan di Indonesia dua tahun terakhir dengan data triwulanan.

**Grafik 1.1**

**Kemiskinan di Indonesia**



Sumber: bps.go.id

Dilihat dari data tingkat kemiskinan diatas, presentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan

akibat dari pandemi covid-19 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi menurun dan tingkat kemiskinan meningkat. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah agar perekonomian kembali stabil dan tingkat kemiskinan bisa menurun.

Salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang memiliki harta berlebih serta mampu mengeluarkan harta kekayaannya berupa Zakat, Infaq dan juga Sedekah (ZIS) kepada masyarakat miskin. Zakat sifatnya wajib, sedangkan Infaq dan juga sedekah bersifat sukarela (Baitul Mal).

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, zakat merupakan hal yang tidak asing karena zakat merupakan rukun Islam yang wajib dijalankan. Selain zakat hal yang juga dianjurkan untuk umat Islam adalah berinfaq dan bersedekah. Sejak zaman Rasulullah, penyaluran zakat, infaq, sedekah sudah ada namun penyalurannya tidak melalui lembaga amil zakat akan tetapi diberikan langsung kepada mustahik.<sup>2</sup> Ada juga yang diberikan kepada orang yang dipercaya untuk menyalurkannya ke mustahik. Hal tersebut dirasa kurang maksimal karena bisa jadi dana yang disalurkan tersebut diberikan kepada orang yang sama, padahal masih banyak mustahik lain yang juga membutuhkan sehingga penyalurannya menjadi tidak merata.

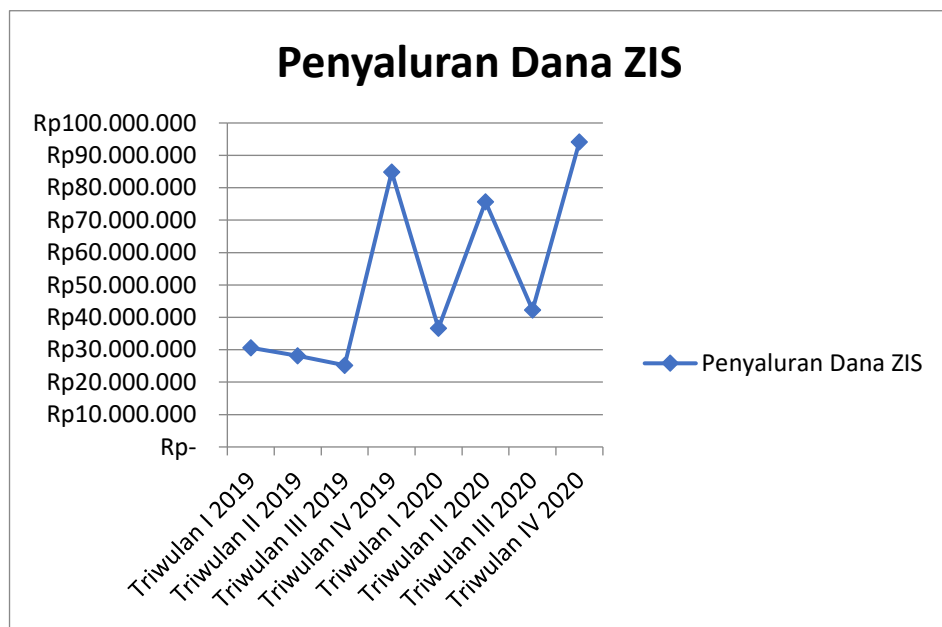
Oleh karena itu dengan adanya lembaga amil zakat, sangat membantu dalam penyaluran dana ZIS. Dana ZIS sendiri disalurkan kepada 8 asnaf, salah

---

<sup>2</sup> Romadhon, Abdul H. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03. No. 01. 2017

satunya adalah fakir miskin. Seiring perkembangan zaman, lembaga amil zakat bukan hanya berwenang dalam penyaluran, tetapi juga dalam pengelolaan, pengumpulan serta penghimpunan. Pengelolaan zakat yang baik akan berdampak pula pada kesejahteraan mustahik. Berikut adalah grafik jumlah penyaluran dana ZIS dua tahun terakhir dengan data triwulanan.

**Grafik 1.2**  
**Penyaluran ZIS di Indonesia**



Dari data diatas dapat diketahui bahwa penyaluran dana ZIS diawal tahun 2019 sekitar Rp 30.581.535 dan mengalami penurunan ditengah tahun. Akan tetapi diakhir 2019 penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 84.835.211. Diawal tahun 2020 penyaluran dana ZIS mengalami penurunan kembali yaitu sebesar Rp 36.6565.966 dan

juga mengalami fluktuasi di tengah tahun, tetapi pada akhir tahun 2020 penyaluran dana ZIS mengalami peningkatan yaitu sejumlah Rp 94.183.522.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah.<sup>3</sup>

Desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di sebuah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk setempat. Menurut Cooray pemerintah daerah harus dapat memiliki tata pemerintahan yang baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu potensi dampak positif dari penerapan desentralisasi fiskal Indonesia adalah berkembangnya kompetisi antar pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya.<sup>4</sup> Saat ini pemerintah tengah fokus ke beberapa hal, salah satunya adalah mendukung penuh pengadaan belanja sosial. Hal ini terus diupayakan oleh pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil mampu berperan dalam mengurangi kemiskinan dan juga kesenjangan. Berikut adalah

---

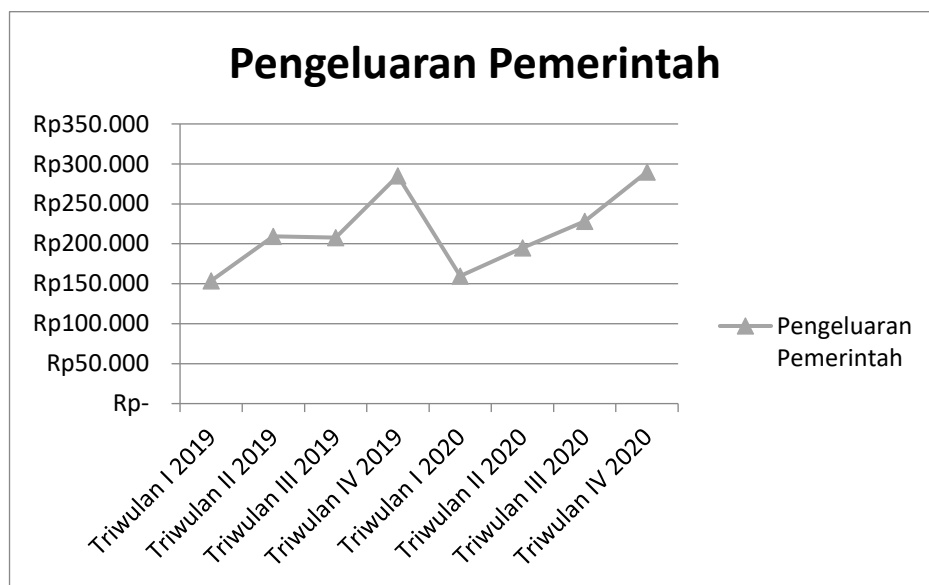
<sup>3</sup> Osinubi, T. S. Macroeconometric Analysis Of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria. *Pakistan Economic and Social*, 12(2), Tahun 2005 hal 249–269

<sup>4</sup> Al Husna, N. M., & Yudhistira, H. Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), Tahun 2017 hal 113–124.

grafik pengeluaran pemerintah dua tahun terakhir yang diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan di Indonesia

**Grafik 1.3**

**Pengeluaran Pemerintah**



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa banyaknya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan mengalami fluktuasi. Pada awal tahun 2019 sebesar Rp 153.741 (miliar) dan mengalami kenaikan pada triwulan II sebesar 209.462 (miliar). Pada triwulan III pengeluaran pemerintah mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp 207.772 (miliar) dan meningkat lagi diakhir tahun 2019. Akan tetapi pada awal tahun 2020 mengalami penurunan dan naik lagi pada triwulan II sampai akhir tahun 2020.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan pada bidang ekonomi, dimana yang menjadi

indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, sumber daya manusia merupakan suatu input yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara untuk mencapai suatu kesejahteraan.

Paradigma pembangunan yang di anut suatu negara dapat berubah dengan seiringnya perubahan waktu. Apabila di awal perkembangannya, paradigma pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan produksi, maka paradigma ini berubah menjadi pembangunan yang berorientasi pada distribusi pertumbuhan yang berkembang lagi menjadi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada saat ini paradigma yang tengah berkembang dan juga dianut adalah *Human Centered Development* atau pembangunan yang berpusat pada manusia.<sup>5</sup>

Perubahan paradigma ini juga berdampak pada Indonesia. Sejak sepuluh tahun terakhir, pembangunan nasional Indonesia telah menjadikan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini ditujukan agar meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan. Agar tujuan tersebut tercapai maka pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai sumberdaya, baik dari aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), aspek fisik (kesehatan), aspek moralitas (iman dan ketakwaan) maupun aspek intelektualitas (pendidikan) sehingga terciptanya peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur kualitas manusia dan skala ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

---

<sup>5</sup> BPS. (2020). Indeks Pembangunan Manusia 2020

sendiri merupakan indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pembangunan kualitas manusia. Yang memperkenalkan IPM pertama kali adalah United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM ini merupakan indeks komposit yang didasarkan pada tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*man years of schooling*), serta *Purchasing Power Parity* (yang merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan daya beli). Badan Pusat Statistik (BPS) telah merubah beberapa indikator dari IPM yang sudah tidak relevan untuk digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu Angka Melek Huruf yang diubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah, lalu Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang diubah menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

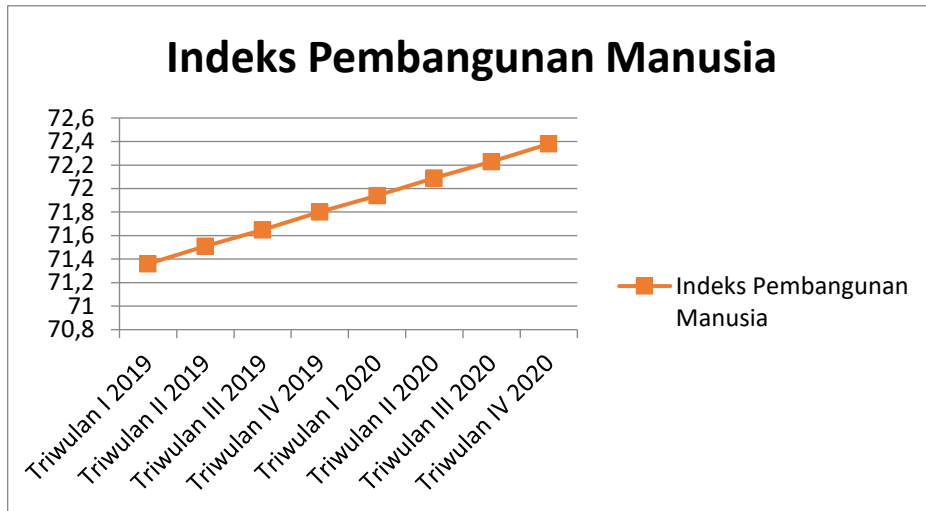
Selain itu, kemiskinan juga dapat menjadi disparitas dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan kemiskinan bisa menghambat seseorang untuk mendapat pendidikan yang layak, dan juga tingkat kesehatan yang layak dapat menjadi penyebab tidak adanya peningkatan pada sumber daya manusia dan menjadi penyebab meningkatnya pengangguran.

Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Berikut adalah grafik Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dua tahun terakhir dengan data triwulanan.



**Grafik 1.4**

**Indeks Pembangunan Manusia**



Selama dua tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami kenaikan sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, serta daya beli masyarakat. Menurut BPS angka ini mengalami kenaikan karena presentase rumah tangga yang bisa mengakses air minum bersih dan rumah tangga yang menggunakan air minum layak mengalami peningkatan, dan perkawinan dini

Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai alat untuk pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan

Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal

ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seorang perempuan secara tidak langsung akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan banyak berguna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam pasar tenaga kerja lokal.

Tiga landasan penting dalam pembangunan manusia adalah berumur panjang, sehat dan kreatif; berpengetahuan luas; dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Banyak hal lain yang juga penting, terutama dalam membantu menciptakan kondisi yang tepat untuk pembangunan manusia. Beberapa di antaranya terdapat dalam gambar di bawah ini. Apabila dasar-dasar pembangunan manusia dapat tercapai, masyarakat dapat membuka peluang untuk kemajuan dalam aspek kehidupan lainnya.<sup>6</sup>

Dilihat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat judul mengenai “PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS), PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”

---

<sup>6</sup> Vildzah, N., & Muhammad, S . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* Vol.1 No.2 November 2016 : 429-437

## **B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Melihat latar belakang yang ada maka perlu adanya sebuah identifikasi masalah terkait tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu dirasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dimana penelitian tersebut difokuskan pada penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, serta pengeluaran pemerintah.

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dari setiap variabel adalah sebagai berikut: (a) presentase jumlah penyaluran dana zis yang meningkat belum tentu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pengelolaan yang dirasa belum efektif. (b) pengeluaran pemerintah cukup besar jumlahnya jadi harus di analisa apakah pengeluaran yang disalurkan sebanding dengan capaian pengentasan kemiskinan.

### **2. Pembatasan Masalah**

Sementara itu untuk memudahkan penelitian ini maka penting kiranya untuk menentukan variabel-variabel yang akan menjadi konsentrasi penelitian ini. Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah Penyaluran dana zakat, infak, sedekah, pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, kemiskinan sebagai variabel dependen dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Data yang diambil

pada penelitian ini adalah data triwulanan pada kurun waktu 10 tahun terakhir (2011-2020).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana Penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia?
5. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia?
6. Bagaimana penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening?
7. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Penyaluran dana ZIS terhadap Kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh Pengeluaran terhadap Kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh Penyaluran dana ZIS terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6. Untuk menguji pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
7. Untuk menguji pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening.
8. Untuk menguji pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening.

## **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis bisa diartikan sebagai populasi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu dan kajian di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

H2: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

H3: : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

H4: Penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H5: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H6: Penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening.

H7: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening.

---

<sup>7</sup> Puguh suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis, Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 46.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoretis**

Sebagai sumbangsih dalam pemikiran kajian di bidang ilmu Ekonomi

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Instansi/Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi instansi/lembaga untuk lebih meningkatkan kualitas ilmu khususnya di bidang ekonomi makro yang disampaikan kepada para mahasiswa agar dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pada semua pihak.

#### **b. Bagi Akademik**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pembendaharaan perpustakaan pascasarjana Institut agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung, dan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang Investasi reksadana syariah, bagi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah (ES).

#### **c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah sejenis yang dilakukan oleh peneliti yang akan datang sehingga penelitian tersebut dapat lebih tajam dalam analisisnya dan memberi manfaat yang lebih luas kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian yang berjudul: “*Pengaruh Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening*”, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

#### a. Pengertian Kemiskinan

- 1) Soerjono Soekanto (1982)<sup>8</sup> Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
- 2) BAPPENAS<sup>9</sup> kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.
- 3) BPS (2016)<sup>10</sup> Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dengan pengeluaran.

---

<sup>8</sup> Soerjono Sukanto, ” *Sosiologi: Suatu Pengantar*” (Jakarta:Rajawali Press, 1982) hal 10

<sup>9</sup> [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

<sup>10</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)



4) Kuncoro (1997)<sup>11</sup> Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.

b. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infak ialah derma tambahan yang dikeluarkan oleh seorang muslim mampu dari sebagian hartanya, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Sedekah berarti sebuah pemberian secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan dimana saja demi mengaharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

c. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun

---

<sup>11</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 102-103

kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

#### d. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian yang berjudul: “*Pengaruh Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening*”, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan operasional dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Secara operasional penelitian ini akan diarahkan untuk mendeskripsikan perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia yang

---

<sup>12</sup> Sadono Sukirno. “*Makro Ekonomi Modern :Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian baru*”. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2000

<sup>13</sup> BPS. (2019). Indeks Pembangunan Manusia 2019

dipublikasikan melalui Badan Statistik Pusat (BPS). Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana ZIS, Pengeluaran Pemerintah dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening mengacu pada data 10 tahun terakhir atau dari tahun 2011 sampai 2020.